

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak negara Israel berdiri pada tahun 1948, Amerika Serikat (AS) menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan negara Israel pasca Perang Dunia II. Seiring berjalannya waktu, hubungan ini meluas dan berubah akibat faktor sejarah, politik, dan strategis. Dukungan masyarakat AS terhadap orang-orang Yahudi di Israel salah satunya didasari pengakuan moral atas tragedi Holocaust.<sup>1</sup> Selain itu, kelompok lobi pro-Israel, seperti American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan AS terhadap Israel. Kelompok-kelompok ini menganjurkan kebijakan yang selaras dengan kepentingan Israel dan berupaya memperkuat hubungan AS-Israel.

Negara-negara *the Middle East and North Africa* (MENA), termasuk Arab Saudi, Iran, Irak, Suriah, dan Lebanon, tidak mengakui Israel sebagai negara berdaulat karena mengecah Zionisme Yahudi di tanah Palestina.<sup>2</sup> Namun, dengan bantuan sekutunya, AS, Israel berupaya menciptakan hubungan kerja sama diplomatis yang sah dengan negara-negara MENA.

Oleh karena itu, singkatnya, pada tanggal 22 November 2020 Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu berkunjung ke Arab Saudi mengikuti tema hubungan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara negara-negara Arab dan Israel. Pada paruh kedua tahun 2020 terjadi percepatan normalisasi hubungan dengan dibentuknya Abraham Accords yang ditandatangani bersama Uni Emirat

---

<sup>1</sup> Blackmer, Corinne E., dan Andre Pessin. 2021. "Introduction. In *Poisoning the Wells: Antisemitism in Contemporary America*." New York: ISGAP, hal. 16.

<sup>2</sup> Tiara Febriani Khaerunnisa, "Dampak *Abraham Accords* terhadap Dinamika Keamanan Regional MENA", eprints unram. diakses pada 11 Januari 2024

Arab (UEA) pada bulan Agustus, Bahrain menyusul sebulan kemudian, serta pemerintah transisi Sudan mengumumkan normalisasi hubungan dengan Israel pada Oktober 2020. Abraham Accords berdasar pada premis sederhana; bahwa diplomasi dan komunikasi akan meningkatkan stabilitas, kemakmuran, dan harapan di MENA. Karena faktanya, sebelum Agustus 2020, hanya dua negara Arab yang memiliki hubungan resmi dengan Israel – Mesir pada tahun 1979 dan Yordania pada tahun 1994.<sup>3</sup>

Abraham Accords lebih bersifat sebagai strategi bagi para aktor yang terlibat didalamnya daripada upaya diplomatis sederhana untuk menormalisasi hubungan regional. Kesepakatan ini melibatkan berbagai dimensi, termasuk aspek agama, regional, ekonomi, dan militer. Pada dasarnya, Abraham Accords membawa implikasi agama yang meluas, tidak hanya terbatas pada UEA, tetapi juga melibatkan semua negara Muslim. Saat ini, Israel mencari pengakuan dari negara-negara Muslim di sekitarnya, sementara UEA berusaha untuk mendapatkan keunggulan politik dalam lanskap regional yang lebih luas.<sup>4</sup> Selain itu, campur tangan AS juga terlihat dengan kehadirannya pada salah satu poin di dalam Abraham Accords, tepatnya pada poin ketujuh yang disepakati:

*“Strategic Agenda for the Middle East: Further to the Abraham Accords, the Parties stand ready to join with the United States to develop and launch a “Strategic Agenda for the Middle East” in order to expand regional diplomatic, trade, stability and other cooperation. They are committed to work together, and with the United States and others, as appropriate, in order to advance the cause of peace, stability and prosperity in the relations between them and for the Middle East as a whole, including by seeking to advance regional security and stability; pursue regional economic opportunities;*

---

<sup>3</sup> Ronen Zvulun, “Arab normalisation with Israel in 500 words.” Aljazeera 23/11/2020. diakses pada 11 Januari 2024

<sup>4</sup> Maria tohme, “Abraham Accords Shaping a new Middle East.” Notre Dame University-Louaize 2022. diakses pada 10 Januari 2024

*promote a culture of peace across the region; and consider joint aid and development programs.*"<sup>5</sup>

Menariknya, perjanjian ini tidaklah sedamai kelihatannya, meskipun perjanjian tersebut secara luas dipandang sebagai titik balik dalam hubungan Arab-Israel dan merupakan tanda optimisme bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Namun seorang pengamat Jeffrey Goldberg menganggap bahwa Abraham Accords pada dasarnya adalah perjanjian persenjataan.<sup>6</sup>

Pimpinan The Palestinian Authority (PA), Mahmoud Abbas mengutuk kesepakatan normalisasi antara Israel dengan UEA, Bahrain, dan Sudan dengan menanggapi sebagai "tikaman bahaya terhadap perjuangan Palestina". Kritik pemerintah Palestina terhadap Abraham Accords terkait dengan sejumlah alasan, termasuk ketidakpartisipan Palestina dalam perundingan, kekhawatiran terhadap penyelesaian akhir konflik, dan pengalaman buruk dengan perjanjian sebelumnya, seperti Oslo Accords.<sup>7</sup> Kekhawatiran terhadap ketidakadilan pada perjanjian sebelumnya memicu keraguan terhadap efektivitas perjanjian terkait isu konflik Israel-Palestina ini.

Lebih lanjut, implementasi geopolitik AS di negara-negara MENA dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan demikian, geopolitik di kawasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari analisis geoekonomi minyak bumi dan konflik bersenjata. Kemudian, peneliti menemukan konsep yang tepat terhadap awal mula geopolitik AS di MENA, konsep *nareland* (*Natural Resource Lands*) merupakan konsep yang mempertimbangkan lokasi geografis

---

<sup>5</sup> *Abraham Accords Peace Agreement: Treaty of Peace, Diplomatic Relations and Full Normalization between the United Arab Emirates and the State of Israel, UEA-Israel*, 15 September 2020, UST. diakses pada 10 Januari 2024

<sup>6</sup> Jeffrey Goldberg, "Iran and the Palestinians Lose Out in the Abraham Accords," *The Atlantic*, 16/9/2020. diakses pada 10 Januari 2024

<sup>7</sup> Hassan S. (2011), *Oslo Accords: "The Genesis and Consequences for Palestine"*, *Social Scientist*, Vol. 39, No. 7/8

yang memiliki sumber daya alam penting secara ekonomi<sup>8</sup>. Saat ini, kendali atas sumber daya energi, khususnya minyak bumi di MENA, dianggap sebagai salah satu aspek kebijakan geopolitik AS.<sup>9</sup> Selain itu, lokasi strategis wilayah ini dan pengaruhnya terhadap pasar energi global lebih lanjut menegaskan signifikansinya bagi kebijakan luar negeri AS. Analisis geopolitik memungkinkan eksplorasi keterkaitan antara faktor domestik dan internasional, memberikan pencerahan tentang bagaimana keputusan AS memengaruhi stabilitas regional, aliansi politik, dan keseimbangan geopolitik lebih luas.<sup>10</sup>

Dalam konteks pembentukan perjanjian ini, peran AS menarik perhatian karena AS memainkan peran sentral dalam negosiasi, fasilitasi, dan pengumuman Abraham Accords.<sup>11</sup> Presiden Donald J. Trump yang mulai menjabat pada bulan Januari 2017, menerapkan pendekatan yang unik dan tegas terhadap diplomasi MENA, yang ditandai dengan kesediaan untuk menantang kebijaksanaan konvensional dan norma-norma yang sudah ada. Pemerintahannya memainkan peran penting dalam menengahi Abraham Accords, dan perjanjian tersebut dipandang sebagai salah satu pencapaian penting kebijakan luar negerinya di MENA.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, Abraham Accords diperkirakan mempunyai konsekuensi luas terhadap geopolitik MENA, berpotensi mengubah aliansi, struktur kekuasaan, dan dinamika konflik regional. Dari sudut pandang politik, Abraham Accords mewakili kemenangan diplomatik AS dengan menunjukkan

---

<sup>8</sup> Solberg Sjøilen, Klaus. 2012. *“Goeconomics. London: BookBoon”* hal 17-28

<sup>9</sup> Bowman, Bradley L. 2008. *“After Irak: Future U.S Military Posture in the Middle East”*, in the *Washington Quarterly*, 31(2): hal. 77-91

<sup>10</sup> Norlen, T. & Sinai, T. (2020). *“The Abraham Accords – Paradigm Shift or Realpolitik?”* The George C. Marshall European Center for Security Studies. No. 064. diakses pada 13 Januari 2024

<sup>11</sup> Hae Won Jeong. *“The Abraham Accords and Religious Tolerance: Three Tales of Faith-Based Foreign-Policy Agenda Setting”*, *Middle East Policy* (2021), hal 15

<sup>12</sup> Karam, J. (2018). *“The Failure of International Law in Palestine. The Scholar: St. Mary's Law Review on Race and Social Justice*, 20(2),” hal. 139-144.

keterampilan mediasi AS dan menggarisbawahi peran negara tersebut sebagai “pembawa perdamaian” di MENA. Dengan demikian, Abraham Accords dipandang sebagai batu loncatan menuju upaya perdamaian yang lebih luas, karena perjanjian tersebut diharapkan mampu mendorong aktor regional lainnya untuk mencari solusi diplomatik terhadap konflik yang sudah berlangsung lama, termasuk masalah Israel-Palestina.

Sementara itu, kecenderungan politik luar negeri AS pada Israel semakin tegas dengan pernyataan secara sepihak oleh Donald Trump terhadap pemindahan ibu kota Israel pada 6 Desember 2017, diikuti pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem. Status quo di Yerusalem diduga dilanggar dengan pernyataan sepihak Trump.<sup>13</sup>

Negara-negara seperti Palestina, Yordania, Aljazair, Irak serta organisasi Palestina, termasuk The Palestine Liberation Organization (PLO), menilai bahwa Abraham Accords lebih cenderung menguntungkan Israel tanpa memperhatikan aspirasi dan hak-hak rakyat Palestina. Kritik terhadap Abraham Accords juga melibatkan pertimbangan atas ketidaksetujuan terhadap normalisasi hubungan tanpa adanya kemajuan yang signifikan dalam mencapai solusi damai dan keadilan bagi rakyat Palestina.



**Gambar 1.1 Penandatanganan Abraham Accords**

---

<sup>13</sup> UMY Press. “An International Lecturer of UMY: Trump's Unilateral Recognition Infringes the Status of Jerusalem” diakses pada tanggal 17 November 2023

Sumber: CNN.com

Mengingat dampaknya yang besar terhadap stabilitas regional dan politik global, Abraham Accords telah mempengaruhi geopolitik MENA pada awal pembentukan hingga kedepannya. Dengan normalisasi hubungan Israel dengan beberapa negara Arab, perjanjian penting ini menandakan putusnya tradisi diplomatik regional yang sudah lama ada. Perjanjian ini mempunyai potensi untuk mengubah lanskap geopolitik MENA dengan menyelaraskan kembali aliansi, mempengaruhi konflik lokal, dan mengubah dinamika keamanan energi global.<sup>14</sup> Topik ini sangat relevan bagi penulis untuk memahami implikasi perkembangan guna mengevaluasi dampak jangka panjang terhadap geopolitik AS dalam konteks pergeseran aliansi regional di MENA melalui Abraham Accords serta implikasinya terhadap kebijakan luar negeri AS, dan ilmu hubungan internasional.

## 1.2 Rumusan Masalah

Abraham Accords adalah perjanjian normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel yang ditandatangani pada tahun 2020 bersama UEA dan Bahrain serta difasilitasi oleh AS. Perjanjian ini mencerminkan transisi dinamika regional AS di MENA yang diharapkan mampu mengubah lanskap geopolitik dengan Israel dibawah naungan AS dengan menyelaraskan kembali aliansi dan mengubah dinamika keamanan global. Namun, tidak sedikit pula pihak yang menentang perjanjian ini karena menganggap perjanjian ini atas dasar konflik Israel-Palestina yang tak kunjung usai hingga intervensi AS terhadap negara-negara Arab. Oleh karena itu, topik ini sangat relevan bagi penulis untuk

---

<sup>14</sup> Benstead, Lindsay (2022). "Can the Abraham Accords Succeed? Exploring Arab Support for Normalization with Israel. The Wilson Center." diakses pada 19 November 2023.

memahami implikasi perkembangan guna menganalisis geopolitik Amerika Serikat dalam konteks pergeseran aliansi regional di MENA melalui Abraham Accords.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana geopolitik Amerika Serikat dalam konteks pergeseran aliansi regional di MENA melalui Abraham Accords?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Menyuguhkan analisis deskriptif mengenai fenomena Geopolitik Amerika Serikat dalam Konteks Pergeseran Aliansi Regional di MENA melalui Abraham Accords.
- 2.. Menghasilkan analisis yang bermanfaat tentang Geopolitik Amerika Serikat dalam Konteks Pergeseran Aliansi Regional di MENA melalui Abraham Accords.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah, penelitian ini diharapkan memberi sumbangan secara praktis, bagi mahasiswa, dosen, masyarakat dan peneliti untuk mendapatkan kajian informasi seputar Geopolitik Amerika Serikat dalam Konteks Pergeseran Aliansi Regional di MENA melalui Abraham Accords.

Selain itu secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan kepustakaan dalam Ilmu Hubungan Internasional dalam kajian

geopolitik AS di MENA khususnya setelah lahirnya Abraham Accords dan mampu memberikan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan untuk mengkaji fenomena yang serupa.

## 1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa tulisan dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya berfungsi sebagai tolak ukur dan landasan berpikir bagi penulis dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian serta membantu menjawab pertanyaan penelitian yang ada.

Penelitian pertama tulisan Muhammad Restu Saputra yang berjudul Analisis Kepentingan Amerika Serikat pada Abraham Accords terhadap upaya Perdamaian Israel-Palestina.<sup>15</sup> Tulisan ini mengkaji konsep adaptasi negara dalam tatanan global, menekankan perjuangan mendasar untuk bertahan hidup yang dihadapi oleh suatu negara dengan menguraikan dua metodologi untuk adaptasi negara: meniru, dimana negara meniru kemampuan negara yang lebih kuat, dan menyeimbangkan, dimana negara menyusun strategi untuk melawan kekuatan negara yang lebih kuat. Tulisan ini juga menyoroti pentingnya keseimbangan kekuatan antar negara bagi keamanan dan stabilitas global, menekankan pada pengembangan teknologi militer yang berkelanjutan sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan ini.

Penulis merasa berkontribusi dalam menggarisbawahi sifat penting dari kondisi ini bagi negara-negara sebagai unit sistem neorealistis, dengan potensi negara-negara berkekuatan tinggi untuk cepat beradaptasi dan berpotensi

---

<sup>15</sup> Muhammad Restu Saputra (2021), "Analisis Kepentingan Amerika Serikat pada *Abraham Accords* terhadap upaya Perdamaian Israel-Palestina." diakses pada tanggal 12 Februari 2024



menjadi aktor sistemik yang kuat. Tulisan dikaitkan dengan Waltz pada tahun 1979 dan menyelidiki peran penting kepentingan nasional, khususnya kelangsungan hidup, dalam membentuk perilaku negara dalam tatanan global.

Tulisan kedua oleh Aziz Ur Rehman dalam *The Middle East International Journal for Social Sciences* (MEIJSS) yang berjudul *Causes behind the Abraham Accord and its consequences for the Peace Process in the Middle East*.<sup>16</sup> Dalam artikel tersebut, Abraham Accords dianggap sebagai langkah signifikan yang sangat maju, diharapkan dapat menjadi pemicu perdamaian dalam konflik antara Palestina dan Israel. Banyak pihak menekankan pentingnya bagi Israel untuk menerima persyaratan perdamaian dari Palestina setelah penandatanganan perjanjian ini. Pentingnya perjanjian ini harus terus-menerus mendapat sorotan dari pihak AS ke depannya, dengan tujuan memastikan efektivitas kebijakan tersebut. Penulis merasa tulisan ini mampu menekankan peran AS dalam memfasilitasi perkembangan diplomatik dan kepentingan strategisnya di MENA. Hal ini menjawab kekhawatiran dan penolakan dari beberapa pihak, termasuk Israel, mengenai penjualan senjata dan aliansi regional. Tulisan ini memberikan pandangan mengenai dinamika kompleks di MENA, termasuk keterlibatan aktor non-negara dan implikasi yang lebih luas terhadap tatanan internasional.

Tulisan ketiga oleh Christian Oscar Alexander Abrahamsen Myrvold berjudul *The Abraham Accords: A Comparative Perspective on American Foreign Policy in the Middle East*.<sup>17</sup> Paper penelitian ini mengevaluasi dampak Abraham Accords dan perjanjian nuklir Iran, membandingkan

---

<sup>16</sup> Aziz Ur Rehman (2020), "*The Middle East International Journal for Social Sciences* (MEIJSS) yang berjudul *Causes behind the Abraham Accord and its consequences for the Peace Process in the Middle East*." diakses pada 12 Februari 2024

<sup>17</sup> Christian Oscar Alexander Abrahamsen Myrvold (2022), "*Causes behind the Abraham Accord and its consequences for the Peace Process in the Middle East*." diakses pada 14 Februari 2024

pendekatan terhadap kerja sama keamanan di MENA oleh mantan Presiden Trump dan Obama. Studi ini mempelajari tentang *two-level game theory*, dan pendekatan *'hub-and-spoke'* dengan menggunakan tinjauan literatur kualitatif sebagai dasar metodologi, makalah ini mengumpulkan, menginterpretasi, dan mensintesis informasi. Tulisan ini menekankan pandangan yang berbeda tentang pencapaian kebijakan luar negeri dan kekurangan dari kedua presiden, mengawasi perubahan geopolitik di MENA serta asal dan konsekuensi dari Abraham Accords, khususnya dalam dimensi ekonomi dan keamanan. Selain itu, tulisan ini menyelidiki motivasi signifikansi teori, dan konteks teori hubungan internasional di MENA.

Pertanyaan penelitian menekankan pentingnya multilateralisme, normalisasi, dan hubungan diplomatik, menganalisis bagaimana Abraham Accords telah memengaruhi aktor seperti Israel, Arab Saudi, dan Iran dalam mempengaruhi kerjasama ekonomi dan keamanan mereka, dan membentuk lanskap politik di MENA. Tulisan ini mengevaluasi dampak geopolitik MENA melibatkan penguraian pembagian menjadi dua aliran yang dikenal sebagai aliran revisionis dan aliran status quo di MENA dengan pemilihan metodologi kualitatif dan sumber informasi yang mendukung temuannya.

Peneliti merasa bahwa tulisan ini mampu membandingkan pendekatan kerjasama keamanan multilateral yang diadopsi oleh Obama dan Trump mengikutsertakan penekanan pentingnya tinjauan literatur untuk menilai perbedaan kualitatif dalam kebijakan luar negeri dan memahami faktor-faktor kunci dalam keamanan regional. Tulisan ini pun menjelajahi motif di balik Abraham Accords dengan memaparkan latar belakang mendalam mengenai teori hubungan internasional di MENA. Selain itu, membahas dampak

Abraham Accords terhadap hubungan diplomatik, keuntungan ekonomi, dan kerjasama keamanan.

Pada bagian kesimpulan membahas tentang dampak Abraham Accords pada berbagai negara di MENA, termasuk UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko, dengan menegaskan potensi manfaat ekonomi dan perbedaan dalam pencapaian kebijakan luar negeri kedua presiden dari segi gaya dan substansi. Secara keseluruhan, tulisan ini memberikan analisis menyeluruh mengenai Abraham Accords dan konsekuensinya di tingkat regional.

Studi pustaka keempat merupakan karya Amr Yossef yang berjudul *The Regional Impact of the Abraham Accords*.<sup>18</sup> Artikel ini memberikan latar belakang penting mengenai berbagai keberpihakan yang telah membentuk geopolitik di kawasan MENA. Tulisan ini membahas bagaimana keadaan di MENA setelah terjadinya pemberontakan *Arab Spring* pada tahun 2011, kawasan ini terbagi menjadi dua kubu utama – kubu status quo dan kubu revisionis. Negara-negara status quo seperti Mesir, negara-negara Teluk dan Yordania umumnya bekerja sama dengan Barat dan mendukung hubungan damai dengan Israel. Sementara itu, kubu revisionis yang dipimpin oleh Iran dan Turki menentang pengaruh Barat dan berupaya melakukan konfrontasi dengan Israel. Pembagian ini menjelaskan kepentingan di balik Abraham Accords saat ini antara Israel, UEA, dan Bahrain. Amr Yossef menegaskan bahwa Abraham Accords telah mengkonsolidasikan keselarasan status quo di kawasan melawan kekuatan revisionis. Dengan meresmikan normalisasi antara Israel dan negara-negara Teluk, perjanjian tersebut memperkuat kerja sama antara “poros moderasi” yang terdiri dari negara-negara Kuartet Arab (Arab

---

<sup>18</sup> Amr Yossef (2021), “*The Regional Impact of the Abraham Accords*.” diakses pada 15 Februari 2024

Saudi, UEA, Mesir, dan Bahrain) ditambah Israel. Hal ini melawan meningkatnya pengaruh “poros radikal” yang dipimpin oleh Iran dan proksinya di negara-negara seperti Suriah, Irak dan Lebanon. Perjanjian tersebut menunjukkan adanya pemahaman keamanan bersama antara Israel dan negara-negara Teluk untuk bersama-sama menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh Iran dan Turki di kawasan.

Artikel tersebut juga berpendapat bahwa Abraham Accords memiliki kepentingan simbolis yang signifikan. Dengan berfokus pada kerja sama ekonomi, perjanjian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat regional tidak lagi menginginkan persatuan pan-Arab namun malah menginginkan peningkatan taraf hidup. Hal ini menandakan menurunnya relevansi retorika revisionis lama yang menentang perdamaian dengan Israel. Kurangnya protes massal juga menunjukkan adanya perubahan prioritas masyarakat. Terakhir, artikel ini menyoroti bagaimana Abraham Accords menunjukkan semakin besarnya kepemimpinan negara-negara Teluk Arab dalam geopolitik MENA. Anggota status quo lainnya, Mesir dan Yordania, menyambut baik kesepakatan tersebut, namun peran sekunder mereka menggambarkan “Gulfisasi” politik regional dengan negara-negara Teluk yang kini menjadi penggerak agenda tersebut. Hal ini menjadikan analisis Amr Yossef sangat relevan untuk memahami dinamika kekuasaan saat ini di MENA.

Penulis merasa, jurnal ini menyajikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai dampak regional dari Abraham Accords 2020. Informasi latar belakang Yossef mengenai dua kubu yang berlawanan menambah konteks penting. Evaluasinya mengenai dampak Perjanjian ini terhadap blok-blok kekuasaan dan aspek simbolis yang terkandung di dalamnya menjadikan

hal ini sebagai referensi utama untuk memahami dinamika perubahan di lingkungan Arab-Israel. Relevansi tulisan ini terhadap topik yang akan dibahas penulis terletak pada kajiannya terhadap kepemimpinan negara-negara Teluk di kawasan yang menyertai perkembangan strategis ini.

Tulisan kelima yang berjudul *The Abraham Accords Shaping a new Middle East* karya Maria Tohme<sup>19</sup>. Jurnal ini berpendapat bahwa sifat terobosan yang diakui dari Abraham Accords. Harapan bahwa seluruh negara Arab akan dengan cepat berdamai dengan Israel secara berantai dianggap terlalu ditekankan. Penambahan Bahrain dan Maroko, bersama mitra-mitra lain yang tidak diungkapkan, menggambarkan bahwa dampak Abraham Accords terhadap keamanan dan kemakmuran regional dapat memiliki implikasi yang luas. Meskipun demikian, dampak potensial perjanjian ini melampaui perkiraan awal penciptanya, dengan pengaruh yang berlangsung bertahun-tahun ke depan, terutama karena adanya penerimaan luas terhadap jalur yang diambil oleh aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Tohme memulai dengan melacak pembagian sejarah di MENA antara kekuatan nasionalis-sekuler dan ajaran Islamis. Dia membahas bagaimana *Arab Spring* tahun 2011 mempercepat pergeseran, membawa Iran dan Turki ke garis depan melawan negara-negara yang tradisionalnya bersekutu dengan AS. Latar belakang ini membentuk konteks yang mengarah ke perjanjian 2020.

Selanjutnya, Tohme menganalisis setiap penandatanganan perjanjian - UEA, Bahrain, Sudan, Maroko - memeriksa perhitungan strategis dan prioritas ekonomi yang menutupi isu Palestina. Dia berpendapat bahwa hal ini mencerminkan penurunan ideologi di wilayah tersebut yang lebih memihak

---

<sup>19</sup> Maria tohme (2022), "*The Abraham Accords Shaping a new Middle East.*" diakses pada 15 Februari 2024

pada pragmatisme. Tohme menilai bahwa perjanjian ini mempromosikan model yang lebih sekuler melawan Islam yang terpolitisasi dan membangun kembali aliansi regional dengan AS dan Israel. Dalam dimensi ekonomi, Tohme mengevaluasi potensi perjanjian. Dia mengutip ambisi untuk transfer teknologi/pengetahuan yang dapat meningkatkan negara-negara pembangunan. Ini mencerminkan aspirasi mereka untuk kepemimpinan regional di masa depan. Kerjasama dalam investasi/perdagangan dapat menghidupkan kembali ekonomi yang terpukul pandemi.

Tulisan ini kemudian membahas implikasi untuk negara-negara kunci. Perjanjian merusak retorika Pan-Islamis Turki dan memberdayakan poros yang dipimpin oleh Saudi-UAE. Sementara itu, dukungan publik yang merosot untuk Iran dapat semakin mengisolasi negara tersebut. Tohme juga memeriksa posisi kompleks Palestina. Sebagai kesimpulan, Maria Tohme menekankan bahwa perjanjian tersebut mencerminkan pergeseran paradigma yang didorong oleh pertimbangan sosioekonomi yang didorong oleh AS melebihi faktor ideologis. Arsitektur regional yang baru ini mengkonsolidasikan pengaruh AS.

Tulisan Tohme memberikan analisis mendalam tentang perhitungan strategis dan dinamika kekuasaan yang berubah di MENA melalui Abraham Accords. Pandangannya tentang implikasi untuk aliansi regional dan negara-negara utama seperti Iran, Turki, dan Arab Saudi sangat relevan untuk memahami konteks geopolitik peran AS yang menjadikan tulisan ini dirasa menjadi referensi yang valid untuk penelitian ini.

## **1.7 Kerangka Konseptual**

### **1.7.1 Geopolitik**

Kerangka konseptual "geopolitik" menjadi landasan yang kuat dan relevan untuk menguraikan dinamika geopolitik AS di MENA, terutama ketika mengkaji dampak transformatif Abraham Accords terhadap aliansi regional. Geopolitik pada intinya melibatkan eksplorasi tentang bagaimana faktor geografis, melibatkan dimensi fisik, politik, dan budaya, memengaruhi politik internasional dan perilaku strategis suatu negara. Gagasan mengenai teori geopolitik dalam ranah ilmu hubungan internasional bermula dari sejumlah individu dan pemikir. Salah satu figur terkemuka dalam perkembangan teori geopolitik adalah Sir Halford Mackinder, seorang akademisi geografi dan politikus asal Inggris, terkenal sebagai salah satu tokoh utama dalam perkembangan teori geopolitik dalam ilmu hubungan internasional. Di awal abad ke-20, Mackinder memperkenalkan konsep-konsep kunci yang merinci pandangannya terhadap keterkaitan antara geografi, kekuatan, dan politik global.<sup>20</sup>

Pada tahun 1904, Mackinder menyampaikan makalah yang berjudul "*The Geographical Pivot of History*" di *Royal Geographical Society*. Makalah ini mengenalkan ide "H" atau "Heartland" yang mencakup wilayah luas di tengah-tengah Eurasia. Mackinder melihat ini sebagai pusat kekuatan global yang memiliki strategis penting.

Poin utama dari teorinya adalah bahwa negara atau kekuatan yang mengendalikan Heartland memiliki keunggulan geostrategis dan mampu mengontrol akses ke semua benua. Mackinder berpendapat bahwa penguasaan atas

---

<sup>20</sup> Fettweis, Christopher J. "*Sir Halford Mackinder, Geopolitics, and Policymaking in the 21st Century*", *Parameters*, Summer 2000. diakses pada 24 Januari 2024

memberikan keuntungan signifikan dalam persaingan global dan dapat membawa dominasi global bagi kekuatan yang berhasil mengendalikannya.<sup>21</sup>

Dalam konteks keterlibatan AS di MENA, Abraham Accords mewakili perkembangan geopolitik yang mendasar. Inisiatif diplomatik ini, yang berujung pada normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab kunci seperti UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko, menuntut pemeriksaan mendalam melalui prisma geopolitik. Analisis semacam itu memungkinkan pemahaman yang canggih tentang bagaimana geografi, seluk-beluk regional, dan dinamika politik kekuatan global berkonvergensi untuk membentuk kebijakan luar negeri AS di MENA.

Penerapan kerangka konseptual geopolitik terhadap Abraham Accords bersifat multifaset. Pertama dan terutama, dengan memfasilitasi eksplorasi kepentingan strategis AS di wilayah tersebut. Abraham Accords mampu menciptakan aliansi dan kemitraan baru, merupakan contoh *recalibration* strategis yang bertujuan meningkatkan stabilitas regional, aspek yang secara inheren terkait dengan lanskap geografis dan geopolitik MENA.<sup>22</sup>

Selanjutnya, kerangka konsep ini membantu memahami pergeseran dinamika kekuatan regional yang diinduksi oleh Abraham Accords. Perjanjian normalisasi memiliki potensi untuk membentuk kembali aliansi tradisional dan memengaruhi keseimbangan kekuatan di MENA, aspek-aspek yang menjadi pusat dalam analisis geopolitik keterlibatan AS di wilayah tersebut.

---

<sup>21</sup> Brian Blouet, "The imperial vision of Halford Mackinder", *Geographical Journal*, Vol. 170, Issue 4, pp. 322–329. diakses pada 24 Januari 2024

<sup>22</sup> Mahdi D. Nazemroaya, "Plans for Redrawing the Middle East: The Project for a 'New Middle East'" (*Montreal: Global Research-Centre for Research on Globalization*, 2006) diakses pada 24 Januari 2024



Pertimbangan ekonomi, dimensi penting dalam geopolitik, juga tercerahkan oleh kerangka konseptual. Kerja sama ekonomi dan perjanjian perdagangan yang tertanam dalam Abraham Accords, khususnya antara Israel dan negara-negara Teluk, muncul sebagai komponen penting yang harus dipelajari dalam konteks ekonomi lebih luas di MENA.

Pertimbangan keamanan dan perkembangan lanskap aliansi merupakan lapisan analisis lain dalam kerangka geopolitik. Abraham Accords dinilai dapat memengaruhi pengaturan keamanan regional, menuntut pemeriksaan melalui lensa geopolitik untuk mengurai kompleksitas aliansi yang berubah dan dinamika keamanan di MENA.

Selain itu, persaingan global untuk memengaruhi adalah integral dalam geopolitik. Analisis Abraham Accords dalam konteks persaingan kekuatan global menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana AS secara strategis menempatkan dirinya *vis-à-vis* aktor utama lain di MENA, memberikan pemahaman komprehensif tentang dinamika geopolitik di wilayah tersebut.

Pada intinya, mengintegrasikan kerangka konseptual geopolitik ke dalam analisis keterlibatan geopolitik AS di MENA melalui Abraham Accords memperkaya kedalaman dan cakupan penelitian ini. Perspektif komprehensif tersebut mencakup dimensi spasial, strategis, ekonomi, dan global, memastikan pemeriksaan menyeluruh terhadap lanskap geopolitik transformatif yang dibentuk oleh perjanjian diplomatik ini.

Melanjutkan eksplorasi mengenai geopolitik AS di MENA dalam kerangka Abraham Accords, sangat penting untuk mengetahui lebih dalam implikasi berikutnya dan prospek yang timbul dari inisiatif diplomatik transformatif ini. Kerangka konseptual geopolitik tetap menjadi instrumen

penting dalam memahami dinamika yang berkembang dan menilai dampak yang berlangsung dari Abraham Accords terhadap geopolitik regional.

Salah satu aspek utama yang perlu diteliti adalah dampak geopolitik pada negara tetangga dan negara-negara di MENA yang tidak menandatangani perjanjian. Saat Abraham Accords membentuk ulang aliansi tradisional dan struktur kekuasaan, negara-negara tetangga mungkin merespons secara strategis untuk melindungi kepentingan mereka, membawa implikasi geopolitik yang kompleks. Geopolitik menyediakan alat analisis yang diperlukan untuk memahami bagaimana dampak ini dapat muncul dalam konteks regional yang lebih luas.

Selain itu, kerangka kerja ini memungkinkan pemeriksaan peran aktor non-negara setelah Abraham Accords. Mengingat dinamika rumit MENA, entitas non-negara seperti kelompok militan, organisasi lintas negara, dan individu berpengaruh dapat secara signifikan memengaruhi geopolitik regional. Geopolitik tentu dapat membantu mengidentifikasi dan memahami dampak aktor-aktor ini pada lanskap geopolitik, hingga menambah lapisan kompleksitas pada analisis.

Titik kritis untuk analisis terletak pada penempatan strategis AS terhadap kekuatan global lainnya setelah Abraham Accords. Geopolitik memfasilitasi eksplorasi bagaimana perjanjian normalisasi memengaruhi spektrum lebih luas dari hubungan internasional, terutama dalam konteks persaingan AS dengan aktor global utama lainnya seperti Cina dan Rusia. Memahami papan catur geopolitik lebih luas memastikan analisis menyeluruh terhadap faktor eksternal yang membentuk keterlibatan AS di MENA.

Lebih lanjut, pemeriksaan risiko dan tantangan geopolitik yang mungkin muncul pasca-*Accords* menjadi sangat penting. Konsep geopolitik dapat membantu meramalkan gangguan potensial, konflik, atau ketegangan diplomatik yang dapat muncul sebagai konsekuensi dari aliansi yang diubah. *Foresight* ini penting untuk memahami daya tahan dan keberlanjutan lanskap geopolitik baru di MENA.

Terakhir, kerangka kerja ini memungkinkan refleksi terhadap implikasi geopolitik jangka panjang bagi AS di MENA. Geopolitik menawarkan lensa strategis untuk menganalisis apakah Abraham Accords mewakili pergeseran mendasar dalam tujuan kebijakan luar negeri AS, aliansi, dan pengaruh di wilayah tersebut. Memahami dampak geopolitik yang berlangsung memastikan perspektif yang proaktif yang melampaui pencapaian diplomatik langsung.

Secara ringkas, kerangka konseptual geopolitik memperkaya analisis mengenai geopolitik AS di MENA dengan memperluas fokus pada dampak pasca-*Accords*. Melalui lensa ini, pemeriksaan melibatkan dampak regional, peran aktor non-negara, dinamika kekuatan global, risiko potensial, dan warisan geopolitik yang berlangsung bagi AS. Pendekatan komprehensif ini memastikan pemahaman menyeluruh terhadap lanskap geopolitik yang kompleks yang dipicu oleh Abraham Accords.

### **1.7.2 *Game Theory***

*Game theory* mulai digunakan dalam ilmu hubungan internasional pada akhir 1940-an, 1950-an, dan 1960-an, terutama untuk memahami dinamika Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet. Teori ini dikembangkan oleh John von Neumann yang secara signifikan memengaruhi strategi militer dan

diplomasi pada periode tersebut. Penggunaan *game theory* untuk mempelajari hubungan internasional semakin meluas, khususnya di kalangan realis. Mereka sepakat dengan asumsi rasionalitas yang menyatakan bahwa negara dan aktor internasional lainnya memberikan prioritas pada berbagai kepentingan, dan mengambil tindakan untuk memajukan kepentingan tersebut. Rasionalitas menganggap bahwa aktor mampu melakukan analisis biaya-manfaat, menghitung biaya yang diperoleh dari tindakan yang mungkin dan manfaatnya. Dalam model pengambilan keputusan realis, para pembuat keputusan menetapkan tujuan, menilai posisi relatif mereka, menganalisis biaya dan manfaat dari setiap kemungkinan tindakan, lalu memilih opsi dengan manfaat tertinggi dan biaya terendah.<sup>23</sup>

Potensi penuh dari *game theory* terletak pada perluasan model aktor rasional di luar pembatasan yang umumnya dimiliki perspektif realis tradisional. Evolusi ini memandang dunia yang lebih kompleks, di mana fokusnya tidak hanya terbatas pada masalah konflik, tetapi lebih pada masalah kerja sama.<sup>24</sup> Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana para aktor yang terlibat mengaplikasikan *game theory* dalam Abraham Accords. Teori ini dianggap mampu menguji bagaimana tiga aktor independen yaitu AS, UEA, dan Israel agar dapat bekerjasama di tengah konflik sejarah dan bagaimana hal tersebut akan memengaruhi geopolitik kawasan MENA.

Menariknya, keterkaitan antara teori geopolitik dan *game theory* dalam ilmu Hubungan Internasional terjadi secara saling berhubungan. Teori

---

<sup>23</sup> Duncan Snidal. (2018) "*The Game Theory Of International Politics*", Trustees of Princeton University, hal 26-30. diakses pada 2 Februari 2024.

<sup>24</sup> Martin Shubik, "*Game Theory and the Paradox of the Prisoner's Dilemma*," *Journal of Conflict Resolution* 14, hal 181-93. diakses pada 2 Februari 2024

geopolitik berfokus pada pengaruh geografi dan kekuatan geografis dalam membentuk kebijakan serta hubungan antarnegara. Sebaliknya, *game theory* menyajikan kerangka kerja matematis untuk menganalisis interaksi strategis di antara pelaku-pelaku internasional.

Keterhubungan antara keduanya termanifestasi melalui pemanfaatan *game theory* untuk menganalisis kebijakan dan tindakan dalam konteks geopolitik. Sebagai contoh, dalam situasi di mana negara-negara bersaing untuk sumber daya alam yang strategis, *game theory* dapat membantu memodelkan interaksi di antara mereka serta memprediksi strategi yang mungkin diambil. Secara umum, *game theory* dapat diterapkan untuk memahami dinamika interaksi di tingkat geopolitik, mencakup strategi negara-negara besar, aliansi regional, bahkan konflik. Dengan demikian, penerapan *game theory* dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memperkaya pemahaman tentang bagaimana faktor geopolitik memengaruhi keputusan dan tindakan dalam ranah hubungan internasional.

Selama proses penyusunan kerangka konseptual, penulis telah menganalisis beberapa pendekatan teoretis yang banyak digunakan dalam studi hubungan internasional, seperti aliran pemikiran realisme, konstruktivisme, dan teori-teori kontemporer lainnya. Setelah mempertimbangkan relevansi, kedalaman analisis, serta kemampuan untuk menguraikan variabel-variabel penelitian, penulis memilih untuk menggunakan teori geopolitik Mackinder dan *game theory* sebagai kerangka kerja utama dalam penelitian ini.

Teori geopolitik Mackinder, meskipun telah dikembangkan sejak awal abad ke-20, masih sangat relevan dalam menganalisis dinamika geopolitik

kawasan MENA. Konsep Heartland Mackinder, yang menekankan pentingnya penguasaan atas wilayah-wilayah strategis dunia, dapat diaplikasikan dalam konteks kawasan MENA yang merupakan jalur lintas benua sekaligus pusat gravitasi bagi energi global. Dalam konteks Abraham Accords, pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana Amerika Serikat secara strategis memperluas pengaruhnya melalui pembentukan aliansi baru berbasis pertimbangan geografis dan geoekonomi.

Sementara itu, penggunaan *game theory* memperkaya kerangka analisis terhadap interaksi strategis antaraktor seperti AS, Israel, dan negara-negara Teluk. *game theory* berasumsi bahwa aktor dalam sistem internasional bertindak secara rasional untuk memaksimalkan kepentingannya, mempertimbangkan strategi pihak lain, dan mengkalkulasi hasil dari berbagai skenario interaksi. Dalam konteks Abraham Accords, teori ini dapat menjelaskan pembentukan koalisi diplomatik melalui mekanisme negosiasi strategis yang melibatkan kepentingan politik, keamanan, dan ekonomi masing-masing pihak.

Sebagai bentuk tinjauan kritis, penulis juga mempertimbangkan pendekatan konstruktivisme. Namun, pendekatan ini dirasa kurang tepat karena lebih menekankan pada konstruksi sosial, identitas, dan norma internasional, yang tidak menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Abraham Accords lebih mencerminkan transformasi cepat dalam kalkulasi geopolitik dan strategi kekuasaan, dibandingkan perubahan nilai atau identitas yang menjadi pokok kajian konstruktivis.

Dengan demikian, pemilihan teori geopolitik Mackinder dan *game theory* dinilai paling tepat untuk menjelaskan dinamika pergeseran aliansi

regional di kawasan MENA, khususnya melalui fasilitasi AS terhadap Abraham Accords. Sinergi kedua teori ini tidak hanya memberikan kerangka analisis makro terhadap struktur kekuasaan global, tetapi juga memperkuat analisis mikro terhadap strategi interaksi para aktor di kawasan tersebut.

## **1.8. Metodologi Penelitian**

Dalam ranah ilmu Hubungan Internasional, metode penelitian merujuk pada serangkaian langkah, konsep, dan prosedur yang penulis gunakan untuk mendapatkan pemahaman mengenai suatu fenomena dalam konteks ilmu hubungan internasional.<sup>25</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang berasal dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>26</sup> Selain itu, peneliti menerapkan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan suatu kesimpulan yang menyeluruh terkait peristiwa tertentu yang dialami oleh individu atau kelompok.<sup>27</sup>

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari sumber tertulis, seperti pernyataan resmi, jurnal, dokumen, dan penelitian sebelumnya, serta data sekunder lainnya. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata tertulis maupun

---

<sup>25</sup> Mochtar Mas'ued. (1994). "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan metodologi", pustaka LP3S. Jakarta 1994. diakses pada 25/1/2024

<sup>26</sup> Robert C. Bogdan and Sari Knopp Biklen. (1992). "*Qualitative Research For Education: An Introduction to Theories and Methods*". (Second Edition: 1992)

<sup>27</sup> Vickie A. Lambert, Clinton E. Lambert. *Qualitative Descriptive Research: An Acceptable Design*, 2. diakses pada 25/1/2024

lisan, yang berasal dari pernyataan dan perilaku orang yang diamati.<sup>28</sup> Proses penelitian kualitatif ini melibatkan langkah-langkah seperti analisis data dan penafsiran makna data. Metode kualitatif dipilih untuk menjawab pertanyaan penelitian yang memerlukan penjelasan atau pemahaman tentang suatu fenomena sosial.<sup>29</sup> Dengan menerapkan metode penelitian kualitatif, peneliti berupaya menggambarkan bagaimana geopolitik AS berkembang dalam konteks perubahan aliansi regional di MENA melalui Abraham Accords. Diharapkan bahwa penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini mampu menyampaikan dengan jelas dan lengkap tujuan dari masalah yang diangkat oleh peneliti.

### **1.8.2 Batasan Masalah**

Dalam sebuah penelitian diperlukan batasan masalah agar fokus penelitian dapat dipersempit dan tidak melebar sehingga hasil penelitian akan koheren dengan latar belakang dan rumusan masalah. Batasan waktu dalam penelitian ini adalah pada tahun 2020-2022. Penulis mengambil jangkauan pada tahun tersebut dikarenakan pada 2020 Abraham Accords digagas dan disahkan pada tahun yang sama oleh Presiden AS yang menjabat kala itu, Donald Trump. Kemudian tahun 2022 menjadi batasan penelitian karena pada periode ini merupakan tahun kedua administrasi pemerintahan presiden AS selanjutnya, Joe Biden. Penulis merasa referensi yang tersedia pada rentang waktu tersebut cukup untuk menyelesaikan penelitian ini dengan menyuguhkan analisis yang komprehensif, relevan dan, akurat.

---

<sup>28</sup> Lexo Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, (2004), hal.14.

<sup>29</sup> Jane Ritchie Dan Jane Lewis, *Qualitative Research Practice: A Guide For Social Science Students And Researchers* (London: Sage Publication, 2003), Hal. 5.



### 1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis merupakan sesuatu yang perilakunya hendak dideskripsikan, dijelaskan dan dipahami. Dengan kata lain, unit analisis ini bisa juga disebut sebagai variabel dependen, yaitu variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lainnya.<sup>30</sup> Sedangkan unit eksplanasi merupakan sesuatu yang dampaknya terhadap unit analisis hendak diamati, Oleh sebab itu, unit eksplanasi bisa juga disebut sebagai variabel independen, yaitu variabel yang keberadaannya mempengaruhi variabel dependen.<sup>31</sup> Unit analisis dalam penelitian ini yaitu geopolitik AS. Hal ini valid menjadi unit analisis dalam penelitian karena geopolitik AS merupakan unit yang hendak dianalisis dan dijelaskan. Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah pergeseran aliansi regional di MENA melalui Abraham Accords. Tingkat analisis merupakan tingkatan objek yang menjadi fokus utama dalam pembahasan dan penjabaran sebuah penelitian.<sup>32</sup> Tingkat analisis dalam penelitian ini berada pada tingkat state atau negara yakni AS. Hal ini ditentukan karena dalam penelitian ini penulis menganalisis geopolitik AS sebagai kelompok kepentingan di kawasan MENA melalui Abraham Accords.

### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang peneliti gunakan adalah data sekunder melalui studi literatur (*litarature reasearch*) berupa penelitian, literatur-literatur terdahulu, situs resmi dan dokumen publikasi. Data sekunder ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka, dimana teknik ini

---

<sup>30</sup> Masoed, "Studi Hubungan Internasional...", 36

<sup>31</sup> MochtarMas'oed. (1994). "Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi", Pusat Antar Universitas – Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, LP3ES, 110

<sup>32</sup> Ibid, hal.41.

adalah teknik pengumpulan data yang membatasi pengambilan data pada literatur maupun dokumen tertulis yang sudah ada.<sup>33</sup> Data-data di dalam penelitian ini diambil dari beberapa sumber melalui situs resmi, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, surat kabar, berita, maupun dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan geopolitik AS dalam pergeseran aliansi regional di MENA melalui Abraham Accords.

#### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Untuk menjawab pertanyaan penelitian dari penelitian ini, penulis melakukan analisis data yang digunakan penelitian sebagai berikut:

Pertama, tahap pengelompokan data. Peneliti melakukan pengelompokan data yang sudah dikumpulkan menjadi beberapa kategori sesuai dengan alur dan jalannya penelitian ini. Awalnya, peneliti mengumpulkan dan mengelompokkan data-data terkait geopolitik AS dalam pergeseran aliansi di MENA. Kemudian hal-hal yang menjadi kepentingan AS di kawasan MENA khususnya dalam pergeseran aliansi regional melalui Abraham Accords.

Kedua, tahap reduksi data, dimana peneliti melakukan penyaringan terhadap data-data yang sudah terkumpul dan sudah dikelompokkan sebelumnya. Tujuan dari tahap reduksi data ini adalah untuk menyeleksi data-data yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Dalam tahap ini, peneliti akan mengeliminasi data-data yang tidak berkaitan sama sekali dengan geopolitik AS dalam konteks pergeseran aliansi regional di MENA melalui Abraham Accords. Hal ini dapat membantu peneliti dalam

---

<sup>33</sup> Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman, *“Designing Qualitative Research, California: Sage Publication”*, Inc. 1999

menjawab pertanyaan penelitian. Data- data dari hasil penyaringan inilah yang kemudian menjadi sumber dasar untuk melakukan penelitian ini. Proses seleksi data dilakukan dengan proses membaca secara garis besar apakah data tersebut dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian ini atau tidak.

Ketiga, tahap interpretasi dan penyajian data. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemaknaan terhadap setiap bahan yang telah dikumpulkan, dan kemudian data-data yang tersedia tersebut kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi. Pada Bab I, peneliti mengedepankan hal-hal dasar yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dan hal tersebut yang menjadi landasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Pada Bab II, peneliti menyajikan doktrin, kebijakan luar negeri, hingga intervensi militer AS serta konsekuensinya terhadap situasi regional. Bab ini juga merincikan faktor-faktor yang mendorong tercapainya Abraham Accords, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran AS dalam geopolitik MENA sebelum kesepakatan tersebut dicapai hingga penyajian data Trump Peace Plan yang merupakan upaya resolusi Konflik Israel-Palestina di tengah dinamika MENA. Terakhir, bab ini juga membahas tentang kemitraan AS dengan Negara Teluk: Arab Saudi dan UEA sebelum Abraham Accords. Kemudian, pada Bab III, peneliti memaparkan pergeseran hubungan antara Israel dan negara-negara Arab terhadap diplomasi dan strategi politik di MENA karena dianggap merangsang peningkatan kerja sama ekonomi antara Israel dan negara-negara Arab, serta membuka peluang baru dalam kolaborasi keamanan dan pertahanan. Bab ini juga mengkaji respons Internasional terhadap Abraham Accords karena karena perjanjian ini dianggap telah mempengaruhi pandangan dan kebijakan negara-negara di luar kawasan MENA. Selanjutnya,

pada Bab IV, peneliti mengurai pergeseran hubungan antara Israel dan negara-negara Arab terhadap diplomasi dan strategi politik di MENA karena dianggap merangsang peningkatan kerja sama ekonomi antara Israel dan negara-negara Arab, serta membuka peluang baru dalam kolaborasi keamanan dan pertahanan. Bab ini juga mengkaji respons Internasional terhadap Abraham Accords karena karena perjanjian ini dianggap telah mempengaruhi pandangan dan kebijakan negara-negara di luar kawasan MENA. Terakhir, pada Bab V, peneliti merangkum keseluruhan mengenai kesimpulan dan saran sebagai hasil dari penelitian.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menggambarkan secara keseluruhan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : GEOPOLITIK AS DI KAWASAN MENA SEBELUM ABRAHAM ACCORDS**

Pada Bab II, peneliti menyajikan doktrin, kebijakan luar negeri, hingga intervensi militer AS serta konsekuensinya terhadap situasi regional. Bab ini juga merincikan faktor-faktor yang mendorong tercapainya Abraham Accords, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran AS dalam geopolitik MENA sebelum kesepakatan tersebut dicapai hingga penyajian data Trump Peace Plan yang merupakan upaya resolusi Konflik Israel-Palestina di tengah dinamika MENA. Bab ini juga membahas tentang kemitraan AS dengan Negara Teluk: Arab Saudi dan UEA sebelum Abraham

Accords. Terakhir, pada subbab kelima merupakan penjabaran dari mencakup posisi strategis Mesir di MENA

### **BAB III : PERUBAHAN DINAMIKA MENA PASCA-ABRAHAM ACCORDS**

Bab ini menjelaskan pergeseran hubungan antara Israel dan negara-negara Arab terhadap diplomasi dan strategi politik di MENA karena dianggap merangsang peningkatan kerja sama ekonomi antara Israel dan negara-negara Arab, serta membuka peluang baru dalam kolaborasi keamanan dan pertahanan. Bab ini juga mengkaji respons Internasional terhadap Abraham Accords karena karena perjanjian ini dianggap telah mempengaruhi pandangan dan kebijakan negara-negara di luar kawasan MENA.

### **BAB IV : GEOPOLITIK AMERIKA SERIKAT DALAM KONTEKS PERGESERAN ALIANSI REGIONAL DI MENA MELALUI ABRAHAM ACCORDS**

Bab ini menjelaskan bagaimana dampak geopolitik AS terhadap pergeseran aliansi regional dan tanggapan negara-negara Arab. Bab ini juga mericikan AS sebagai fasilitator utama terbentuknya Abraham Accords serta implementasinya melalui upaya diplomatik, bantuan ekonomi serta implikasinya terhadap stabilitas dan dinamika kawasan di MENA.

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini merangkum keseluruhan mengenai kesimpulan dan saran sebagai hasil dari penelitian.



